

## Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019

Rochmah Dianing Ratri\*<sup>1</sup>, dan Moh. Aris Munandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

#### Article History

Disubmit 20 Januari 2022

Diterima 30 Juni 2022

Diterbitkan 2 Juli 2022

#### Kata Kunci

efektivitas kebijakan publik pemerintah daerah; pengembangan potensi lokal; koperasi dan UMKM

### Abstrak

Hasto Wardhoyo menjabat sebagai Bupati Kulon Progo sejak tahun 2012 menjadikan potensi lokal Kulon Progo mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk lebih dikembangkan. Inovasi kebijakan publik Bupati Kulon Progo melalui kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo mendorong pengembangan potensi lokal untuk melindungi produk lokal Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Efektivitas pelaksanaan kebijakan Publik Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan yaitu Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM, kebijakan yang dibuat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo, ketepatan pelaksanaan yaitu pelatihan pengemasan produk, perizinan HKI, bantuan permodalan dengan bekerjasama dengan perbankan, BUMD, BUMN melalui pinjaman kredit, pemasaran produk melalui Tomira, ketepatan target yaitu untuk target dapat tercapai koperasikabupaten Kulon Progo telah melakukan takeover pada 19 toko modern menjadi Tomira dengan anggota UMKM penyeton, dan ketepatan lingkungan baik Pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, pelaku Koperasi dan UMKM serta masyarakat memberikan dukungan. 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu jiwa entrepreneurship dan skill masyarakat yang masih rendah, faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komitmen dari para pelaku usaha Koperasi dan UMKM.

### Abstract

Hasto Wardhoyo has served as Regent of Kulon Progo since 2012, making Kulon Progo's local potentials starting to get attention from local governments to be further developed. Kulon Progo Regent's public policy innovation through the Bela and Beli Kulon Progo policy encourages the development of local potential to protect local products of Kulon Progo Regency Cooperatives and MSMEs. This study uses a qualitative method. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of this study are 1) The effectiveness of the implementation of Kulon Progo Regent's public policy in developing local potential which can be seen from the accuracy of the policy, namely Perda Kulon Progo Regency No. 5 of 2016 concerning Local Potential and Perda No.16 made in accordance with the problems faced by Kulon Progo Regency, the accuracy of implementation, namely training on product packaging, IPR licensing, capital assistance in collaboration with banks, BUMD, BUMN through credit loans, product marketing through Tomira, target accuracy, namely for the target to be achieved cooperative Kulon Progo Regency has takeover at 19 modern shops into Tomira with staking MSMEs members, and environmental accuracy both the local government, the Cooperative and MSMEs Office, cooperatives and MSMEs s' actors and the community provide support. 2) Inhibiting factors in the implementation of policies, namely the spirit of entrepreneurship and community skills which are still low, the supporting factors in implementing the policy are the commitment of cooperatives and MSME entrepreneurs.

\* E-mail: rochmahdianingr@gmail.com

Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

## PENDAHULUAN

Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo terkenal berkat inovasinya dalam memimpin Kulon Progo dalam mendongkrak pengembangan potensi lokal melalui program “Bela dan Beli Kulon Progo”. Pelaksanaan kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo ini dimulai dengan pengembangan destinasi wisata yang dikelola pemerintah kabupaten bersama masyarakat, kemudian mewajibkan PNS dan pelajar untuk menggunakan batik gebleg renteng yang merupakan batik khas Kulon Progo demi mendongkrak industri batik lokal. Hasto Wardoyo juga mewajibkan PNS untuk membeli beras hasil petani Kulon Progo 10 kilogram setiap bulannya, bahkan beras RASTRA di Kulon Progo menggunakan beras hasil produksi petani Kulon Progo. Hasto Wardoyo juga mengembangkan usaha PDAM Kulon Progo dengan memproduksi air kemasan merk AirKu (Air Kulon Progo) serta *takeover* supermarket seperti Alfamart dan Indomaret oleh koperasi dan diganti dengan nama Tomira (Toko Milik Rakyat) yang dikelola oleh Koperasi di Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal UMKM masyarakat Kulon Progo.

Keberadaan Kulon Progo yang berada pada posisi yang strategis yaitu pada jalur lintas selatan Pulau Jawa yang merupakan jalur distribusi barang dan jasa serta dengan adanya pembangunan bandara YIA memberikan dampak bagi masyarakat yaitu terutama dengan peluang produk-produk luar Kabupaten Kulon Progo yang berusaha masuk ke Kulon Progo sehingga keberadaannya dapat mengancam produk-produk lokal masyarakat Kulon Progo. Kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo sebagai promosi yang mengarahkan masyarakat Kulon Progo untuk membela Kulon Progo dengan membeli produk-produk lokal masyarakat Kulon Progo. Pengembangan produk lokal dilakukan dengan meningkatkan kinerja koperasi yang melakukan *takeover* pada swalayan modern di Kulon Progo menjadi TOMIRA (Toko Milik Rakyat) sebagai wadah UMKM dalam pemasaran produk.

Kebijakan yang dibuat Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo dalam pengembangan produk lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan semangat “Bela dan Beli Kulon Progo” memberikan kesempatan bagi masyarakat Kulon Progo untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan perlindungan terhadap potensi lokal masyarakat Kulon Progo serta peningkatan perekonomian dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Kebijakan dapat berjalan dengan adanya kerjasama yang baik dan terarah antara Pemerintah Daerah, SKPD, Koperasi dan UMKM serta masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pengembangan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo melalui Koperasi dan UMKM.

Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Taufiqurrokhman, 2014: 3). Efektivitas kebijakan publik menurut Matrik Matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan (Yulianto Kadji, 2015:78-80). Potensi lokal adalah kekayaan alam budaya, dan SDM pada suatu daerah. Pengertian produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal Pasal 1 ayat (4) “Produk Lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat”. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu (Hariyadi dalam Well Yuliatmoko, 2010)..

Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan publik Matrik Matland yang menyatakan “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Manfaat praktis penelitian ini: Bagi Kepala Daerah, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sehingga bermanfaat untuk pemantauan pelaksanaan program-program yang dihasilkan. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi tentang perencanaan program dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan pada kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Bagi BAPPEDA, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi tentang perencanaan program dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan pada kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Bagi DPRD, penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan program kerja atau kebijakan yang berdasarkan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sehingga bermanfaat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan bagi pihak pemerintah Daerah maupun masyarakat dan dinas terkait mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Bagi Mahasiswa, agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi, dan UMKM Kulon Progo. Sumber data skun-

der berasal dari RPJMD dan LKJIP Dinas Koperasi dan UMKM. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitiannya adalah kantor BAPPE-DA Kabupaten Kulon Progo, kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, UMKM Manunggal, dan Tomira KUD Harapan Temon. Fokus penelitiannya adalah kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan hasil yang ditemukan di lapangan, efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM didasarkan pada tercapainya target untuk mengembangkan potensi lokal masyarakat Kabupaten Kulon Progo yaitu menyangkut semua elemen kebijakan baik Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi, pelaku UMKM dan masyarakat. Semua pihak harus bekerjasama secara sinergis dan berkesinambungan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar sehingga target dapat tercapai. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Produk Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dikeluarkannya Perbup No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menjelaskan mengenai efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM.

### **Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019**

Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri (2017:3), Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Matrik Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78-80) memiliki "empat tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Keefektifan implementasi kebijakan harus memenuhi "empat tepat", maka Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 yaitu sebagai berikut:

### **Ketepatan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.**

Ketepatan kebijakan merupakan hal yang harus dipahami oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan yang disusun harus dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai efektivitas serta diterima oleh semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu, harus menguntungkan semua pihak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dilaksanakan dengan ditetapkan Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM serta Perbup No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

Kebijakan pengembangan potensi lokal disusun berdasarkan permasalahan dan potensi yang dihadapi kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 yaitu tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta kompetensi sumber daya manusia yang masih rendah. Kebijakan pengembangan potensi lokal dirumuskan untuk melindungi produk lokal masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari produk luar Kulon Progo melalui "Bela dan Beli Kulon Progo" agar tidak tersaingi dan tidak kalah bersaing dengan produk luar Kulon Progo yaitu dengan mendorong berkembangnya UMKM. Dalam mengatasi permasalahan pengembangan potensi lokal tersebut, maka pemerintah daerah bersama seluruh elemen kebijakan menetapkan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kulon Progo Sebagai pelaksana kebijakan adalah Dinas Koperasi dan UMKM beserta masyarakat pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Dinas Koperasi dan UMKM selaku SKPD pelaksana kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM memiliki fokus pelaksanaan kebijakan yaitu terlindunginya potensi lokal Kulon Progo. Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM sebagai kebijakan untuk melindungi produk lokal masyarakat Kulon Progo karena letak Kulon Progo yang strategis sebagai jalur distribusi barang dan jasa harus dimanfaatkan untuk mengembangkan produk lokal dan mencegah masuknya produk luar Kulon Progo masuk dan menjadi saingan bagi produk lokal masyarakat Kulon Progo.

Pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan penuh tanggung jawab dan sejalan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Kabupaten Kulon progo yang dibuat bersifat mem-

berdayakan masyarakat serta mengarahkan masyarakat. Pengembangan potensi lokal bertujuan untuk terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM. Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif untuk memiliki kemandirian ekonomi.

Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM yaitu dengan pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan taraf hidup dan berdaya saing, Bedah menoreh mendukung kawasan wisata Borobudur, Bela-beli Kulon Progo sehingga UMKM memiliki daya saing sesuai dengan Perbup Mitra dan Usaha. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai SKPD pelaksana memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM.

Pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Koperasi yaitu mendorong koperasi untuk mengelola TOMIRA (Toko milik Rakyat) yang bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan PT.Indomarco untuk memasarkan produk koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Pengurus TOMIRA (Toko milik Rakyat) diberikan sosialisasi mengenai kebijakan pendirian, kepengurusan serta pengelolaan TOMIRA untuk mewujudkan pelaksanaan program Bela dan Beli Kulon Progo dalam memasarkan produk lokal Kulon Progo. Setidaknya sampai tahun 2020 ini Koperasi di Kabupaten Kulon Progo telah melakukan *take over* pada 19 toko modern di Kabupaten Kulon Progo.

Pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Koperasi dan UMKM yaitu memberikan sosialisasi kebijakan mengenai pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM, diberikan pelatihan mengenai pengemasan produk dan pemasaran produk sehingga produk dapat memenuhi syarat untuk dapat masuk toko modern, difasilitasi dalam perizinan HKI, penguatan permodalan kerjasama dengan lembaga perbankan, BUMN, dan BUMD serta para pelaku UMKM dikenalkan dengan pemilik toko modern baik PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Indomarco maupun pengurus TOMIRA (Toko Milik Rakyat).

**Ketepatan Target Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.**

Ketepatan target tercapai apabila target yang ditentukan tepat sesuai dengan sasaran, tujuan dan program kebijakan. Target yang disusun sesuai yang direncanakan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain sehingga pemerintah daerah, SKPD pelaksana dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan sejalan dalam mencapai target pengembangan potensi lokal. Pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM menjadikan Koperasi bertambah anggotanya karena dengan adanya *takeover* pada 19 pasar modern oleh koperasi di Kabupaten Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal koperasi dan UMKM menjadikan Koperasi dan UMKM yang memasarkan produknya di TOMIRA (Toko

Milik Rakyat) otomatis harus menjadi anggota Koperasi yang melakukan *takeover* mengingat kondisi koperasi yang kini melemah karena berkurangnya anggota. Selain itu, UMKM juga mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produk Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM ini menguntungkan bagi keberlanjutan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. TOMIRA (Toko Milik Rakyat) juga hanya menjual produk lokal Kulon Progo dan tidak menerima produk luar Kabupaten Kulon Progo.

Koperasi dan UMKM merasa senang karena mendapatkan perhatian dari pemerintah dan secara ekonomi masyarakat menjadi terbantu dengan adanya UMKM memberikan lapangan pekerjaan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Koperasi dan UMKM mendapatkan kemudahan dalam perizinan HKI, BPOM dengan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM sehingga produk dapat lebih luas lagi jangkauan pemasarannya baik dalam maupun luar daerah serta produk dapat masuk ke toko-toko modern. Koperasi dan UMKM mendapatkan kemudahan dalam pemasaran produk karena dikenalkan dengan pemilik toko modern yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT. Indomarco dan pemilik TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Pelatihan pengemasan produk menjadikan kemasan produk koperasi dan UMKM dapat memenuhi standar untuk memasuki toko modern.

**Ketepatan Lingkungan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.**

Ketepatan lingkungan dapat tercapai apabila antara pihak perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan yang dijalankan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan berbagai elemen kebijakan. Semua pihak dapat menerima kebijakan dengan baik sehingga dapat terlaksana dengan baik serta tercapainya target. Kerjasama yang searah dan sejalan antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan menjadikan lingkungan kebijakan dapat mencapai efektivitas. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM ini terjadinya kerjasama yang baik dari Bupati sebagai pembuat kebijakan dan SKPD terkait sebagai pelaksana kebijakan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, masyarakat beserta Koperasi dan pelaku UMKM sehingga target yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan selaras.

Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendampingan dalam pengembangan produk lokal pada Koperasi dan UMKM. Bupati Kulon Progo sebagai pembuat kebijakan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM dengan melakukan kunjungan pada koperasi dan UMKM dan kegiatan Gebyar UKM untuk mengetahui pengembangan produk lokal dan kenyataan di lapangan dari pelaksanaan kebijakan. Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan perbankan, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya, juga bekerjasama Kementen-

rian Koperasi UKM RI, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI dan PT Angkasa Pura I untuk melakukan *takeover* terhadap 19 toko modern sebagai wadah untuk memasarkan produk lokal koperasi dan UMKM Kulon Progo.

### Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019

Adanya pelayanan perizinan satu atap yang memudahkan dalam pengurusan perizinan, pengutan permodalan dari perbankan, KUR, BUMN dsb kerjasama dengan Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I sehingga dapat mendorong UMKM untuk lebih berkembang melalui fasilitas pinjaman kredit dan bantuan permodalan serta *takeover* pada 19 toko modern yang memudahkan dalam pemasaran produk serta fasilitas perizinan HKI menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kendala dari pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM adalah

- Jiwa *entrepreneurship* yang masih rendah serta belum memiliki keterampilan (*skil*) menjadi kendala dalam pengembangan potensi lokal sehingga usaha yang sifatnya mikro dan baru sering berganti-ganti usaha serta sulit bertahan di pasaran sehingga perlu adanya diklat kewirausahaan.
- Masih ada koperasi dan UMKM yang belum memiliki perizinan HKI dan BPOM sehingga produknya belum bisa memasuki toko modern.
- Masih ada produk Koperasi dan UMKM yang kemasan produknya tidak sesuai dengan standar kemasan untuk dapat memasuki toko modern serta pengiriman luar daerah dan luar negeri.
- Belum adanya UMKM Center sebagai tempat untuk pusat pelatihan, konsultasi *display* dan pengembangan UMKM.
- Belum adanya Rumah Kemasan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan dalam pengemasan produk.
- Belum bisa melakukan pemasaran *online* karena tidak memiliki *marketplace* pada beberapa UMKM sehingga pemasaran produk kurang luas.

Solusi dalam mengatasi kendala dalam pengembangan potensi lokal harus adanya pembenahan dari hulu ke hilir sehingga baik bahan baku maupun hasil potensi terjaga kualitasnya serta adanya pemantauan terhadap potensi luar Kulon Progo saat masuk Kulon Progo sehingga diharapkan potensi lokal tidak kalah bersaing dengan potensi luar Kulon Progo. Masyarakat juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan bantuan modal serta diarahkan untuk menjual barang melalui *marketplace* dan Tomira sebagai wadah untuk mempromosikan dan memasarkan produk lokal serta komitmen dari para pelaku usaha Koperasi dan UMKM untuk terus menjalankan usahanya.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Ke-

bijakan Publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 menurut Matrik Matland harus memenuhi “empat tepat” yaitu: (1) Ketepatan Kebijakan, kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dilaksanakan berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM. Letak Kabupaten Kulon Progo yang strategis harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja. (2) Ketepatan pelaksanaan, Dinas Koperasi dan UMKM mengembangkan potensi lokal dengan adanya program Bedah Menoreh, kawasan industri Borobudur dan program bela dan beli Kulon Progo Kulon Progo sehingga UMKM memiliki daya saing dengan adanya fasilitas HKI, pelatihan dan bantuan permodalan melalui pinjaman kredit perbankan, BUMN, BUMD serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi. (3) Ketepatan Target, pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM berhasil melakukan *take over* pada 19 toko modern menjadi TOMIRA (Tomira) bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Indomarco dan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal Koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM sudah memiliki perizinan HKI. Jumlah anggota koperasi pengurus TOMIRA (Toko Milik Rakyat) bertambah karena UMKM pemasok TOMIRA (Toko Milik Rakyat) menjadi anggota koperasi. Koperasi dan UMKM pemasok terfasilitasi dalam memasarkan produknya. (4) Ketepatan Lingkungan, pemerintah Daerah, SKPD, dan masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM. Bupati Kulon Progo selalu melakukan pengawasan di lapangan untuk mengetahui perkembangan produk lokal Koperasi dan UMKM Kulon Progo. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana memberikan pendampingan pada koperasi dan UMKM berupa pelatihan, perizinan HKI dan permodalan. Masyarakat pelaku UMKM mendukung pelaksanaan kebijakan dengan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran produk.

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 yaitu jiwa *entrepreneurship* yang masih rendah, masih adanya koperasi dan UMKM yang belum memiliki HKI, kemasan produk yang tidak sesuai standar, belum adanya UMKM Cneter sebagai tempat pelatihan, display dan konsultasi UMKM, belum adanya Rumah Kemasan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan dalam pengemasan produk serta pemasaran produk yang belum dilakukan secara *online* karena kebanyakan usaha Koperasi dan UMKM belum memiliki *marketplace*. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal

melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 yaitu dengan adanya fasilitas perizinan HKI dan pelatihan pengemasan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengurus usahanya sehingga produk memiliki daya saing dan memenuhi standar untuk masuk ke toko modern, dengan *take over* toko modern untuk memasarkan produk lokal menjadikan pemasaran produk lokal terfasilitasi.

## SARAN

Bagi Kepala Daerah, beberapa program yang belum tercapai untuk menjadi evaluasi SKPD dalam pelaksanaan program tersebut serta dilakukan pengawasan dan evaluasi mengenai faktor penghambat dalam tercapainya program untuk mengetahui kendala apa saja yang didapatkan oleh SKPD.

Bagi SKPD, SKPD yang mengalami hambatan dan masalah dalam melaksanakan program untuk berkoordinasi dengan SKPD yang terkait maupun BKD untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Bagi Masyarakat, masyarakat harus aktif dalam dalam mengontrol kebijakan, masyarakat juga aktif untuk berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya kebijakan sehingga kebijakan dan program dapat mencapai target yang dikehendaki.

Bagi DPRD, pengawasan anggaran kebijakan hendaknya dilakukan secara teliti karena dalam pelaporan dokumen LKPJ masih terdapat kesalahan berupa kesamaan keterangan dari dua SKPD yang berbeda serta evaluasi dari kebijakan agar dapat mengurangi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press  
Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.

Hatimah, Ihat. 2006. *Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal di PKBM*.

Kadji, Yuliyanto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2019

Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Bupati Kulon Progo No 74 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan UMKM

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cv.

Taufiqurrokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama Pers

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Utami, Puji dan Sulistyani Budiningsih. 2015. *Jurnal Vol. 12 No. 2 Oktober 2015: Potensi Dan Ketersediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Di Kabupaten Banyumas*.

Yuliatmoko, Welly. 2010. *Inovasi Teknologi Produk Pangan Lokal Untuk Percepatan Ketahanan Pangan*.